



**PENYELESAIAN PELANGGARAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH  
DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM  
DAN HUKUM POSITIF**

**(Studi Di BAWASLU PROVINSI LAMPUNG)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

**Oleh:**

**BERIYANSYAH  
NPM : 1221020031**

**Program Studi : Jinayah Siyasah**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1439 H / 2017 M**

**PENYELESAIAN PELANGGARAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH  
DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM  
DAN HUKUM POSITIF**

**(Studi Di BAWASLU PROVINSI LAMPUNG)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

**Oleh:**

**BERIYANSYAH  
NPM : 1221020031**

**Program Studi : Jinayah Siyasah**

**Pembimbing I : Dr. Alamsyah, S.Ag.,M.Ag.**

**Pembimbing II : Drs. Hendry Iwansyah, M.A**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1439 H / 2017 M**

## ABSTRAK

Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 *Junto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, perubahan selanjutnya diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016. Undang-Undang tersebut pada pokoknya mengatur tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Pemilihan Kepala Daerah sebagai bentuk sebuah demokrasi yang bertujuan untuk mendapatkan Pemimpin Daerah yang diinginkan oleh masyarakat.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bentuk pelanggaran apa saja yang ditemukan oleh BAWASLU Provinsi Lampung dalam pemilihan kepala daerah khususnya di Kabupaten Pesisir Barat dan bagaimana prosedur penyelesaiannya. bagaimana pandangan hukum Islam dan undang-undang terkait dengan penyelesaian pelanggaran Pilkada tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pelanggaran apa saja yang ditemukan oleh BAWASLU Provinsi Lampung dalam pemilihan kepala daerah khususnya di Kabupaten Pesisir Barat dan bagaimana prosedur penyelesaiannya. Mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam dan undang-undang terkait dengan penyelesaian pelanggaran Pilkada tersebut.

Jenis Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*), dan (*library reseach*).

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan secara empiris yuridis. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah jenis data primer dan data sekunder. Metode pengolahan data yaitu dengan cara memeriksa data (*editing*), rekonstruksi data (*reconstructing*) dan sistematis data (*sistematising*). Data dialisis dengan cara deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pelanggaran yang ditemukan oleh Bawaslu dalam pemilihan kepala daerah antara lain adalah pelanggaran tindak pidana, yang termasuk dalam Perampasan C-1 Plano dan Money Politik. Pelanggaran-pelanggaran tersebut telah diselesaikan oleh Panwaslu setempat dengan putusan tidak memenuhi syarat, karenanya tidak dapat dilanjutkan ketahap pengadilan. Menurut undang-undang penyelesaian perkara tersebut diatas telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur penyelesaian yang ditetapkan. Menurut hukum Islam sepanjang penyelesaian perkara tersebut ditujukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, maka tidak ada keberatan dalam arti tidak bertentangan dengan prinsip dalam hukum Islam. *Money politic* dalam Pemilihan Kepala Daerah termasuk dalam kategori *risywah muharramah*, diharamkan bagi pemberi dan penerima, karena pemberi dan penerima sudah jelas-jelas telah merealisasikan kecurangan yang tidak dibenarkan oleh syara'. Sedangkan perampasan C-1 Plano termasuk dalam kategori *ghasab*, bagi pelaku perampasan tersebut jika terbukti melakukan, maka haram hukumnya.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Alamat : JL. H. Endro Suratmin, Sukarame Bandar Lampung, Telp. ☎ (0721) 703289*

**PERSETUJUAN**

Judul : **PENYELESAIAN PELANGGARAN  
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM  
PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM  
POSITIF (Studi Di Bawaslu Provinsi Lampung)**

Nama : Beriyansyah  
Npm : 1221020031  
Jurusan : Jinayah Siyasah  
Fakultas : Syari'ah

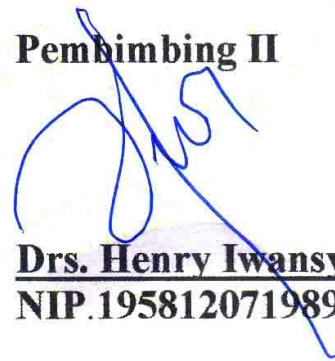
**MENYETUJUI**

Untuk di Munaqosyahkan dan di Pertahankan dalam sidang  
Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

  
**Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.**  
**NIP. 19009011997031002**

**Pembimbing II**

  
**Drs. Henry Iwansyah, M.A**  
**NIP. 1958120719890310003**

**Mengetahui  
Ketua Jurusan Jinayah Siyasah**

  
**Drs. Susiadi AS., M.Sos.I.**  
**NIP. 195808171993031002**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Alamat : JL. H. EndroSuratmin, Sukarame Bandar Lampung, Telp. ☎ (0721) 703289*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul: **PENYELESAIAN PELANGGARAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF** (Study Dibawaslu Provinsi Lampung) disusun oleh **BERIYANSYAH, NPM.1221020031**, Program Studi: **Jinayah Siyasah**, telah diajukan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Pada Hari/Tanggal:

**TIM PENGUJI :**

**Ketua : Khoiruddin, M.S.I**

(.....)

**Sekretaris : Kartika S., M.Pd**

(.....)

**Penguji I : Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H**

(.....)

**Penguji II : Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag**

(.....)

**Dekan  
Fakultas Syari'ah**

**Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197009011997031002**



## MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

"Sesungguhnya Allah menyuruhkamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruhkamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah member pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.

Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat"

(Q.S An-Nisa : 58)



## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya. Dengan kerendahan hati, kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda dan ibundaku tersayang yang telah membesarkanku, mendidik serta mendo'akanku. Mohon maaf selama ini telah banyak menyusahkan dan membuat ayahanda dan ibunda kecewa. Jasa kalian takkan mungkin dapat ananda balas walau sampai akhir hayat. Mudah-mudahan kelak dapat membahagiakan dan dapat membuat kalian bangga telah melahirkan ku. Khususnya buat ayah dan ibu beserta keluarga besarku yang selalu menunggu keberhasilan ananda.
2. Kakak ku yang tersayang (Udo Iswanto Ibra S.Pd, Dongah Hifzon Ali Ibra S.Pd) terimakasih atas kasih sayang dan perhatiannya untukku, tawa dan canda kalian adalah semangat bagiku.
3. Sahabat dan teman-teman seperjuangan jurusan JS angkatan 2012.
4. Keluarga Besar Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Jurusan Jinayah Siyasah (HMJ-JS) dan Keluarga Besar Persatuan Pemuda Pelajar Ngambur (PERDAPENA)
5. Seseorang pilihan Allah yang tidak hentinya selalu menyemangati dan memberikanku arahan dia adalah Sahabat dekatku Nurlinawati A.Md.
6. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung.

## RIWAYAT HIDUP

1. Beriyansyah dilahirkan di Pekon Pekonmon Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat pada tanggal 15 juli 1995, anak ketiga dari tiga bersaudara, dari pasangan Ayah Ibrahim dan Ibu Rokiyah.
2. Pendidikan Penulis dimulai dari SD Negeri 1 Pekonmon tahun 2000 lulus tahun 2006. Kemudian melanjutkan pendidikan ke SMP N 1 Ngambur Kabupaten Pesisir Barat, selama menjadi siswa di SMP N 1 Ngambur Penulis mengikuti beberapa organisasi intra diantaranya sebagai Ketua Osis, Pramuka, dan PSHT, dan lulus pada tahun 2009. Kemudian melanjutkan pendidikan ke SMA N 1 Ngambur Kabupaten Pesisir Barat, selama menjadi siswa di SMAN 1 Ngambur Penulis mengikuti beberapa organisasi intra diantaranya sebagai anggota Osis, Pramuka, dan Karate, lulus pada tahun 2012. Pada tahun 2012 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Program Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah Jurusan Jinayah Siyasah atau Hukum Pidana.
3. Selama menjadi mahasiswa penulis juga pernah aktif di beberapa kegiatan intra kampus antaranya menjadi Kader PMII (Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia) dan Kader HMJ-JS (Himpunan Mahasiswa Jurusan-Jinayah Siyasah). Dan kegiatan ekstra kampus antaranya menjadi ketua PERDAPENA (Persatuan Pemuda dan Pelajar Ngambur) Provinsi Lampung periode 2014-2016.



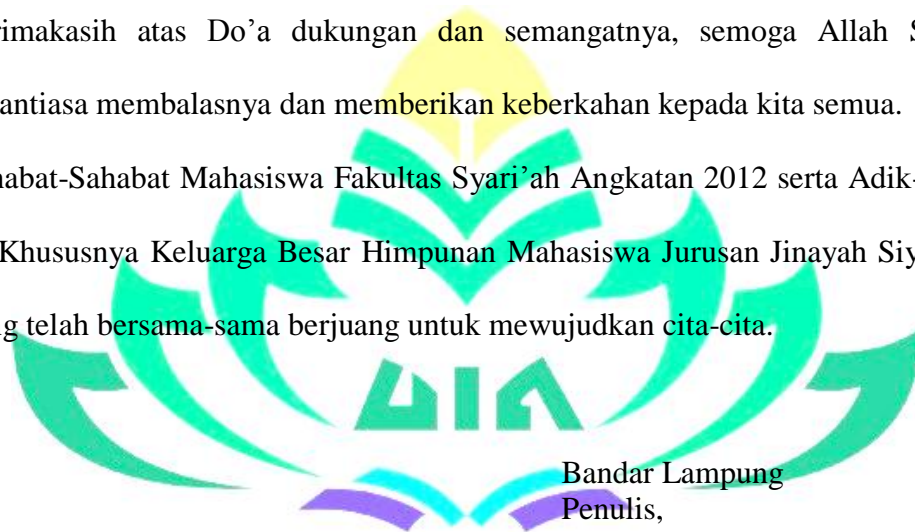
## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Pencipta Semesta Alam dan segala isinya yang telah memberikan kenikmatan Iman, Islam, dan kesehatan jasmani maupun rohani. Shalawat beriring salam disampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan *syafa'at-nya* pada hari kiamat nanti. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Islam di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Jika didalamnya dapat dijumpai kebenaran maka itulah yang dituju dan dikehendaki. Tetapi jika mendapatkan kekeliruan dan kesalahan berfikir, sesungguhnya itu terjadi karena ketidaksengajaan dan karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Karenanya saran, koreksi, dan kritik yang mendukung sangatlah diharapkan.

Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag., Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. Alamsyah, M. Ag., Selaku Dekan Fakultas Syari'ah serta para Wakil Dekan di lingkungan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Drs. Susiadi AS., M.Sos.I., Selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasah dan Bapak Frenki. M.Si., Selaku Sekertaris Jurusan Jinayah Siyasah UIN Raden Intan Lampung.

4. Dr. Alamsyah, S.Ag.,M.Ag., Selaku Pembimbing I, dan Bapak Drs. Henry Iwansyah, M.A., Selaku Pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan.
5. Seluruh Dosen, Asisten Dosen dan Pegawai Fakultas Syari'ah Raden Intan Lampung yang telah membimbing dan membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Bapak Rifki Apriansyah, S.H.,selaku Staf Hukum di Bawaslu dan Bapak Dedi Fernando S.H.,M.H., yang telah memberikan informasi dalam membuat skripsi ini.
7. Kedua Orang Tuaku, kakak-kakak ku, Adik-adikku dan Sahabat-Sahabat. Terimakasih atas Do'a dukungan dan semangatnya, semoga Allah SWT senantiasa membalasnya dan memberikan keberkahan kepada kita semua.
8. Sahabat-Sahabat Mahasiswa Fakultas Syari'ah Angkatan 2012 serta Adik-adik JS Khususnya Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Jurusan Jinayah Siyasa yang telah bersama-sama berjuang untuk mewujudkan cita-cita.



BERIYANSYAH  
1221020031

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
PERSETUJUAN .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
RIWAYAT HIDUP .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x

## BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang Masalah .....	3
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
.....	
1. Tujuan Penelitian .....	7
2. Kegunaan Penelitian .....	7
F. Metode Penelitian .....	8
1. Jenis Penelitian .....	8
2. Sifat Penelitian .....	9
3. Jenis dan Sumber Data .....	10
4. Metode Pengolahan Data .....	11
5. Metode Analisis Data .....	12

## BAB II PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN ISLAM

A. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah dan Urgensinya .....	13
--	----

B. Macam-Macam Pelanggaran Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Mekanisme penyelesaiannya .....	15
1. Macam-Macam Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah.....	15
2. Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Dalam Undang-Undang Tentang PILKADA .....	20
C. Pemilukada Dalam Perspektif Islam .....	22

### **BAB III HASIL PENELITIAN**

A. Profil Lembaga BAWASLU Provinsi Lampung .....	26
1. Sejarah Pembentukan Lembaga Bawaslu Provinsi Lampung...	26
2. Susunan Organisasi .....	30
3. Tata Kerja.....	37
4. Visi dan Misi Lembaga Bawaslu Provinsi Lampung.....	38
5. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu Provinsi Lampung	39
B. Pelanggaran Yang Ditemukan di Bawaslu dan Cara Penyelesaiannya .....	43

### **BAB IV PROSES PENYELESAIAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

A. Tinjauan tentang Proses Penyelesaian.....	48
B. Tinjauan Tentang Hasil .....	59

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. PENEGASAN JUDUL

Skripsi ini berjudul **“Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di BAWASLU Provinsi Lampung)”**.

Untuk lebih memahami maksud dari penulisan tersebut, maka penulis akan memaparkan beberapa penyelesaian tentang istilah-istilah yang digunakan dalam judul.

1. Penyelesaian yaitu pemecahan masalah dari proses berfikir.
2. Pelanggaran yaitu perilaku yang menyimpang untuk melakukan tindakan.

Menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang dibuat.<sup>1</sup> Pemilihan Kepala Daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan atau Kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.<sup>2</sup> Hukum Islam adalah hukum yang mengatur urusan umum dalam pemerintahan Islam dalam merealisasikan asas kemaslahatan dan menolak bahaya selama tidak menyimpang batas-batas hukum dan dasar-dasarnya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> <http://sarwono-supeno.blogspot.co.id/2012/04/pengertian-pelanggaran.html>. 25/09/2016, Jam 14:36

<sup>2</sup> Kancil, *Pemilihan, Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah* (Jakarta : Rineka Cipta, 2005), h. 4

<sup>3</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Politik Hukum Islam* (Yogyakarta : Tiara Kencana, 2005), h. 12



Pemilihan Kepala Daerah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 juncto Nomor 8 Tahun 2015, yang mengatur Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Perubahan lagi diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Jadi berdasarkan penjelasan di atas yang dimaksud dengan Judul ini adalah suatu kajian tentang mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah dilihat dari perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang, penelitian ini dilakukan di BAWASLU Provinsi Lampung.

## **B. ALASAN MEMILIH JUDUL**

Adapun alasan penulis yang mendorong memilih judul proposal skripsi ini adalah:

1. Alasan Obyektif
  - a) Pemilukada merupakan suatu momentum yang sangat penting dalam kehidupan demokrasi, sekaligus tahapan yang menentukan masa depan suatu kelompok masyarakat, baik ditingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten.
  - b) Dalam penyelenggaraan pemilukada, senantiasa ditemui adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para kontestan yang ini memerlukan penanganan yang serius dari Bawaslu.
2. Alasan Subyektif

Penelitian ini sesuai dengan jurusan yang penulis tekuni, yaitu Jinayah Siyasah, selain itu literatur pendukung juga cukup memadai dan tersedia sehingga penulis berkeyakinan bahwa penelitian ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan.

### C. LATAR BELAKANG MASALAH

Pemilihan Kepala Daerah adalah bagian dari proses pendalaman dan penguatan demokrasi (*deepening and strengthening democracy*) serta upaya mewujudkan tata pemerintah yang efektif.

Urgensi diterapkan sistem Pemilihan Kepala Daerah langsung dan serentak juga terkait erat dengan upaya mewujudkan tujuan penting kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, yaitu menciptakan pemerintahan daerah yang demokratis dan mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Pemilihan Kepala Daerah langsung dan serentak merupakan salah satu terwujudnya Kedaulatan Rakyat dalam sistim pemerintahan, serta terwujudnya stabilitas politik dan tujuan pembangunan nasional diyakini dapat terealisasi secara menyeluruh, mengingat sistem demokrasi merupakan perintah langsung UUD 1945.<sup>4</sup> Tahun 2015 adalah tahun bersejarah karena sejak tahun tersebut pemilihan kepala daerah (PILKADA) langsung dan serentak pertama pada Desember 2015.

Alasan penting mengapa pilkada serentak harus dilaksanakan yakni, untuk memperkuat efektifitas sistem pemerintahan presidensial (*efektive government*), efisiensi pembiayaan penyelenggaraan pilkada (*efficient goverment*), dan penataan siklus penyelenggaraan pemilu secara nasional (*election cycle management*).<sup>5</sup>

Dalam hukum Islam Pemilihan Kepala Daerah tidak ada diatur secara khusus dikarenakan Kepala Daerah di masa klasik tidak dipilih melainkan diangkat atau ditunjuk oleh khalifah. Namun demikian Islam memiliki

---

<sup>4</sup> MB.Zubakhrum Tjenreng, *Pilkada Serentak Penguatan Demokrasi Diindonesia* (Jakarta: Putra Kemang, 2006), h.ix

<sup>5</sup> Sinar Grafika, *Undang-Undang Pilkada* (Jakarta : PT. Kelola Printing).

prinsip-prinsip pokok yang dapat digunakan sebagai pedoman dengan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah.

Allah SWT berfirman<sup>6</sup>:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan harikemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”* (Q.S An Nisa : 59)<sup>7</sup>

Dalam ayat di atas, Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk mentaati Allah, Rasul-Nya dan Ulil Amri. Dalam Tafsir Jalalain diterangkan bahwa Ulil Amri dalam ayat tersebut adalah pemegang urusan pemerintahan, yakni para wali yang menjabat sebagai penguasa wilayah, semacam wali kota maupun gubernur. Imam Al Mawardi dalam tafsirnya mengutip suatu hadits dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW, bersabda:

مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ عَصَى اللَّهَ فَقَدْ عَصَى عَصَانِ

Artinya: *“Siapa saja yang taat kepadaku maka sungguh berarti dia taat kepada Allah dan siapa saja yang menentangku maka sungguh berarti dia menentang Allah, dan siapa saja menentang amirku maka sungguh berarti dia menentangku”*.

<sup>6</sup> <http://www.suara-islam.com/read/index/11960/-Hakikat-Pilkada-dalam-Perspektif-Islam-.02/05/2016>, Jam 17:39

<sup>7</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung : Penerbit Dipenogoro, 2009), QS. An Nisa : (59), h. 87

Hadits tersebut menerangkan bahwa urusan ketaatan kepada penguasa dalam perspektif Islam tersambung dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Artinya, politik pemerintahan dunia tidak terpisah dengan ajaran Islam yang berdimensi dunia akhirat. Siapapun muslim, baik sebagai rakyat maupun penguasa tidak boleh memisahkan urusan politik dengan urusan agama Islam.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya : “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”.<sup>8</sup> (Q.S Al Imran:159)

Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 juncto Nomor 8 Tahun 2015, yang mengatur tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Selanjutnya perubahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Dalam hal ini faktanya banyak sekali perbedaan penafsiran antara para pihak atau ketidakjelasan berkaitan dengan masalah fakta kegiatan, peristiwa, ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan gubernur, bupati dan walikota, bahkan pengakuan atau pendapat dari salah satu pihak mendapat penolakan yang berbeda, penghindaran dari pihak lain baik perbedaan penafsiran maupun penolakan.

---

<sup>8</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung : Penerbit Dipenogoro, 2009), QS. Al-Imram (159):25, h. 71

Pemilihan Kepala Daerah sebagai bentuk sebuah demokrasi yang bertujuan untuk mendapatkan Pemimpin Daerah yang diinginkan oleh masyarakat, dengan tujuan terselenggaranya Pelaksanaan otonomi daerah efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Prinsip pelaksanaannya pada pasal (3) adalah pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak diseluruh wilayah Nagara Republik Indonesia Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota yang dapat mengikuti pemilihan proses Uji Publik.

Belakangan ini setiap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah pasti ada kecurangan dan perselisihan antara dua pihak atau lebih sehingga terjadinya pelanggaran. Jenis-jenis pelanggaran dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah menurut Undang-undang secara garis besar dapat digolongkan 3 jenis perbuatan berikut :

1. Pelanggaran tindak pidana pemilu.
2. Pelanggaran administrasi pemilu.
3. Pelanggaran Kode Etik.

Jenis-jenis Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah diatas, itulah yang akan dikaji tentang Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu, di Kabupaten Pesisir Barat. Dalam penelitian ini dengan mengambil objek di dalam wilayah kerja BAWASLU Provinsi Lampung.

Dari latar belakang permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan pengkajian mengenai hal tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul “Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan Kepala Kaerah Dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif ” (Studi di BAWASLU Provinsi Lampung).



#### **D. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bentuk Pelanggaran apa saja yang ditemukan oleh BAWASLU dalam Pemilihan Kepala Daerah khususnya di Kabupaten Pesisir Barat dan bagaimana penyelesaiannya ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam dan undang-undang terkait dengan penyelesaian pelanggaran tersebut ?

#### **E. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN**

##### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Mengetahui bentuk Pelanggaran apa saja yang ditemukan oleh BAWASLU dalam Pemilihan Kepala Daerah dan bagaimana prosedur penyelesaian yang ditempuh ?
- b. Mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam dan undang-undang terkait dengan penyelesaian pelanggaran pilkada tersebut ?

##### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Kegunaan Secara Teoritis
  1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi awal bagi para pihak yang berminat untuk mengkaji masalah ini sekaligus untuk memahami hazanah pengembangan ilmu pengetahuan tentang pelanggaran, khususnya yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah.

2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran tentang pelanggaran pemilihan kepala daerah, khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran pemilihan kepala daerah menurut Islam di lingkungan akademis perguruan tinggi.
- b. Kegunaan Secara Praktis
1. Untuk dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti berikutnya khususnya bagi penelitian penyelesaian pelanggaran pemilihan kepala daerah.
  2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap kebijakan pemerintah di bidang pemilihan kepala daerah.

## **F. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan. Untuk memperoleh dan membahas dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

- 1) *Field Research* yaitu penelitian yang akan dilakukan dilapangan dalam kancan yang sebenarnya<sup>9</sup>, penelitian ini dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lapangan yaitu berupa wawancara (*interview*) untuk mendapatkan informasi terhadap Panitia Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi Lampung.

---

<sup>9</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1993). h.3

2) *Library Research* yaitu penelitian keperpustakaan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat berbagai literatur yang sesuai dengan pokok bahasan kemudiandan disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran tertulis, studi pustaka dilakukan dengan cara membaca dan menelaah serta mencatat berbagai literatur seperti buku tentang hukum pidana, hukum islam, Al-Qur'an dan Hadist serta literatur lainnya yang mempunyai permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

## 2. Sifat Penelitian

Dalam membahas permasalahan skripsi ini, penulis menggunakan dua macam pendekatan anatara lain :

- 1) Pendekatan secara yuridis normatif adalah Pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah dan menelusuri berbagai peraturan perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang ada dan berhubungan dengan permasalahan yang akan yang akan dibahas.
- 2) Pendekatan secara empiris yuridis adalah Pendekatan yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian lapangan yaitu menemukan Pelanggaran apa saja yang ditemukan oleh BAWASLU Provinsi Lampung dalam Pemilihan Kepala Daerah.<sup>10</sup>

Dengan mengadakan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris, memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas dan benar terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu

---

<sup>10</sup> Burhan Bungin. *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta : Grafindo Persada, 2005), h..82

memperoleh gambaran dan faktor dalam menemukan Pelanggaran apa saja yang ditemukan oleh BAWASLU Provinsi Lampung dalam pemilihan kepala daerah dan untuk mengetahui tinjauan hukum islam tentang penyelesaian pelanggaran pemilihan kepala daerah.

### 3. Jenis dan Sumber Data

a) Jenis data yaitu :

1. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian tepatnya dari BAWASLU Provinsi Lampung. Data ini diperoleh melalui wawancara bebas terpimpin, artinya pewawancara mengajukan pertanyaan kepada responden secara bebas menurut irama dan kebijaksanaan wawancara, namun masih dipimpin oleh garis besar kerangka pertanyaan yang telah disiapkan secara seksama dengan pembahan olehpewawancara.<sup>11</sup> Pihak-pihak yang diwanancarai khususnya staf bagian hukum BAWASLU Provinsi Lampung.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain yang berada diluar lapangan penelitian atau bersifat data penunjang.<sup>12</sup> Data sekunder ini diperoleh dari studi perpustakaan, bahan-bahan hukum primer seperti Undang-undang pemilihan kepala daerah, tindak pidana khusus, sistem politik di Indonesia dan bahan-bahan buku sekunder seperti Al-Qur'an dan hadist kamus

---

<sup>11</sup> Cholid Narbuto, *Metode Penelitian* (Jakarta : Bumi Aksara, 2013), h. 83

<sup>12</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*.(Bandung : Alfabeta, 2009), h. 225

bahasa Indonesia, kamus hokum serta literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Dalam data sekunder digunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah cara yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan lain sebagainya. Pelaksanaannya dengan mengadakan pencatatan baik berupa arsip-arsip atau dokumentasi maupun keterangan yang berhubungan dengan gambaran umum lokasi penelitian serta dengan melihat keterangan tentang penyelesaian pelanggaran pemilihan kepala daerah di Bawaslu Provinsi Lampung.

#### 4. Metode Pengolahan Data

Data-data yang telah terkumpul kemudian di olah, pengadaaan data umumnya dilakukan dengan cara antara lain :

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar, sesuai, atau relevan dengan masalah.<sup>13</sup>
- b. Rekonsruksi data (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- c. Sistematis data (*sistematizing*) yaitu penempatan penempatan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

---

<sup>13</sup> Cholid Narbuto, *Ibid*, h. 153



## 5. Metode Analisis Data

Data-data yang terkumpul kemudian diolah secara sistematis sesuai dengan sasaran permasalahan, sekaligus dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat dimengerti.

Analisa deskriptif kualitatif ini digunakan dengan cara menguraikan dan merinci kalimat-kalimat yang ada sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada dengan menggunakan pendekatan berfikir induktif.<sup>14</sup>

Metode ini dilaksanakan dengan cara menganalisa data-data yang ada dari lapangan baik berupa fakta, peristiwa atau kasus yang konkrit terjadi (benar terjadi) dalam hal ini fakta tentang penyelesaian pelanggaran pemilihan kepala daerah. kemudian dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit ditarik generalis yang mempunyai sifat umum.

---

<sup>14</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1993), h. 282

## **BAB II**

### **PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN ISLAM**

#### **A. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah dan Urgensinya**

Pemilihan Kepala Daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat diwilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, tahun 1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah.<sup>15</sup>

Pemilihan Kepala Daerah bukan hanya memilih penguasa daerah, tetapi lebih merupakan mencari pemimpin yang mampu melayani dan mengabdikan untuk kepentingan seluruh rakyatnya. Pola pikir lama yang menempatkan kepala daerah sebagai penguasa yang harus dilayani harus diubah secara radikal menjadi pemimpin sesungguhnya, bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks ini sesungguhnya tugas Kepala Daerah terpilih sangat berat dan hanya mereka yang mampu mengemban tugas tersebut. Oleh karena itu, semua energi daerah harus dicurahkan untuk memilih pemimpin yang terbaik bagi kemajuan dan kesejahteraan daerahnya selama proses Pemilihan Kepala Daerah berlangsung.<sup>16</sup>

Menurut Djohermansyah, Pemilihan Kepala Daerah menjadi kebutuhan mendesak guna mengoreksi sesegera mungkin kelemahan dalam pemilihan kepala daerah masa lalu. Pemilihan Kepala Daerah bermanfaat untuk

---

<sup>15</sup> Kancil, *Pemilihan Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah* (Jakarta : Rineka Cipta, 2005), h. 3

<sup>16</sup> Khairuddin Tahmid, *Netralitas Lembaga Peradilan Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah*, Jurnal Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung (Fakta Press, 2008), h. 22

memperdalam dan memperkuat demokrasi lokal, baik pada lingkungan pemerintahan (governance) maupun lingkungan masyarakat.

Ada lima alasan/manfaat diselenggarakannya Pemilihan Kepala Daerah :

1. Pemilihan Kepala Daerah berpotensi untuk mengurangi arogansi DPRD yang sering mengklaim satu-satunya pemegang mandat rakyat yang representatif. Pemilihan Kepala Daerah akan memposisikan kepala daerah juga sebagai pemegang langsung mandat untuk pemerintahan, sedangkan DPRD sebagai legislasi, anggaran dan pengawasan kebijakan.
2. Pemilihan Kepala Daerah membuat akuntabilitas publik kepala daerah tidak penuh kepada DPRD, tetapi kepada masyarakat daerah selaku konstituennya.
3. Pemilihan Kepala Daerah diharapkan menghasilkan kepala daerah yang bermutu, karena pemilihan langsung berpeluang mendorong majunya calon dan menangnya calon kepala daerah yang kerdibel dimasyarakat daerah, menguatkan derajat legitimasi dan posisi politik kepala daerah sebagai konsekuensi dari sistem pemilihan secara langsung oleh masyarakat.
4. Pemilihan Kepala Daerah menghasilkan mutu pemerintahan daerah yang stabil, produktif dan efektif. Tidak mudah digoyang oleh politisi lokal, terhindar dari campur tangan yang berlebihan atau intervensi pemerintah pusat, tidak mudah dilanda krisis publik dan berpeluang melayani masyarakat secara baik.

5. Pemilihan Kepala Daerah mengurangi politik uang pada saat pemilihan maupun pasca pemilihan, antara lain saat menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepala daerah maupun pengangkatan sekretaris daerah. Pilkada diharapkan mampu menaikkan citra DPRD sekaligus melindungi kepala daerah dari jebakan kolusif dengan legislatif.<sup>17</sup>

## **B. Macam-Macam Pelanggaran Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Mekanisme Penyelesaiannya**

### **1. Macam-Macam Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah.**

Macam-macam pelanggaran sengketa hukum dan pelanggaran pemilu dapat dibagi menjadi tiga jenis, yakni:

- a. Pelanggaran tindak pidana pemilu.
- b. Pelanggaran administrasi pemilu.
- c. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

#### **Ad.a Pelanggaran tindak pidana pemilu**

Pelanggaran tindak pidana pemilu merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.<sup>18</sup>

Bentuk-bentuk ini mencakup antara lain : money pelanggaran politik, pelanggaran dalam pemungutan suara, pemalsuan surat, kekerasan dan ancaman dalam hal menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih, penggunaan fasilitas negara, melibatkan aparat untuk

---

<sup>17</sup> Khairuddin Tahmid, *Ibid*, h. 23

<sup>18</sup> Gotridus Goris Seren, *Kamus Pemilu Populer* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2003), h. 464

pemenangan pasangan tertentu, manipulasi suara, praktik politik uang, keberpihakan dan kelalaian penyelenggara dan pengelembungan suara.

Keberpihakan dan kelalaian pemilukada terkait syarat calon kepala daerah, yang umumnya terjadi dalam dua bentuk :

1. Meluruskan calon yang seharusnya menurut undang-undang pilkada tidak memenuhi syarat.
2. Mendiskualifikasi calon kepala daerah yang menurut undang-undang pilkada seharusnya memenuhi syarat.

Adapun tahapan penindakan pelanggaran tindak pidana pemilihan adalah sebagai berikut :

- a. Penyidik menerima laporan baik dari pemantai pemilihan, peserta pemilihan dan pemilih. Penyidik menggeledah, menyita semua bukti.
- b. Penyidik serahkan berkas kepenuntut umum (PU), dan penuntut umum serahkan kepengadilan selama 14 hari. Jika BAP belum lengkap, diserahkan kembali ke pelapor selama tiga (3) hari, jika berkas BAP sudah lengkap penyidik menyerahkan kembali kepada penuntut umum selama tiga (3) hari. (*Pasal 146 ayat 1 dan 2*)
- c. Penunt umum memeriksa BAP selama lima (5) hari dan dilimpahkan ke pengadilan negeri (PN) dan dilakukan sidang oleh majlis khusus. Pengadilan negeri (PN) berhak memeriksa, mengadili dan memutuskan dalam waktu tujuh (7) hari. (*Pasal 148 ayat 1*)



- d. Dalam hal pemohon melakukan banding maka permohonan itu harus diajukan selama tiga (3) hari setelah putusan dibacakan. (*Pasal 148 ayat 2*)<sup>19</sup>
- e. Selanjutnya pengadilan negeri melimpahkan pemohon banding ke pengadilan tinggi (PT) selama tiga (3) hari. (*Pasal 148 ayat 3*)
- f. Kemudian pengadilan tinggi memeriksa, mengadili dan memutuskan selama tujuh (7) hari. (*Pasal 148 ayat 4*).
- g. Putusan pengadilan tinggi merupakan putusan akhir dengan bersifat tetap dan tidak dapat dilakukan upaya hukum lain (*Pasal 148 ayat 5*)
- h. Pengadilan Tinggi Negeri menyerahkan putusan ke jaksa penuntut umum (JPU) selama tiga (3) hari. Dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) diberi waktu tiga (3) hari harus memutuskan putusan pengadilan tinggi untuk di eksekusi. (*Pasal 149 ayat 1 dan 2*)

#### Ad.b Pelanggaran administrasi

Pelanggaran administrasi yaitu pelanggaran terhadap undang-undang pemilu yang merupakan bukan ketentuan pidana pemilihan dan pelanggaran terhadap ketentuan lain yang diatur dalam ketentuan kampanye yang diatur dalam pemilihan umum.<sup>20</sup>

Pelanggaran Administrasi meliputi pelanggaran terhadap tata cara berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan pemilihan. Contohnya kekacauan mengenai daftar pemilih tetap (DPT)

---

<sup>19</sup> Diah Purnamasari, *Amandemen Undang-Undang Pilkada* (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), h. 228

<sup>20</sup> Eni Suharti, *Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum RI No 15 Th.2011* (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), h. 84

yang menyebabkan sebagian warganegara kehilangan hak pilihnya, pelanggaran semacam ini seolah-olah hanya merupakan persoalan dan pelanggaran administrasi. Akan tetapi jika dicermati, hal ini bisa saja merupakan pelanggaran tindak pidana pemilu, apabila ada unsur kesengajaan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pidana dalam undang-undang pemerintahan daerah.<sup>21</sup>

Ditelusuri dari sisi sanksi, sebut saja seperti pelanggaran yang dilakukan pasangan calon atau tim kampanye dalam bentuk pelanggaran alat peraga atau atribut yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kampanye melibatkan anak-anak, kampanye terselubung dalam bentuk bakti sosial, maka pemberian sanksi pelanggaran ini sangat lemah, yaitu hanya memberikan teguran sehingga tidak memiliki efek jera.

Penyelenggaraan pemilu juga begitu pula, pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon seperti pelanggaran terhadap jadwal kampanye, ijazah palsu, dan jenis pelanggaran lain, tidak ada sanksi tegas bagi kandidat yang dengan sengaja mempengaruhi penyelenggaraan pemilu secara curang. Seharusnya pelanggaran administrasi yang dilakukan dengan sengaja dan bobot tertentu berimplikasi pada diskualifikasi pasangan calon, hal ini untuk meminimalisir pelanggaran yang terjadi.

Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan. KPU Provinsi dan/kota wajib

---

<sup>21</sup> Hamdan Zoelva, *Jurnal Konstitusi* ( Jakarta : MK, 2013 ), h. 386

menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1). KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan pelanggaran administrasi pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, KPU Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 137 ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/kota diterima. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan diatur dalam Peraturan KPU. Dalam hal KPU Provinsi, KPU Kabupaten, PPK, PPS, atau peserta Pemilihan tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 139 ayat (2), Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memberikan sanksi peringatan lisan atau peringatan tertulis.<sup>22</sup>

#### Ad.c Pelanggaran Kode Etik

Pelanggaran Kode Etik adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilihan. Sedangkan tujuan kode etik adalah memastikan terselenggaranya pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

---

<sup>22</sup> Eni Suharti, *ibid*, h. 179

Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal (136) diselesaikan oleh DKPP. Tata cara penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggara pemilihan umum.

Menurut UU Penyelenggara Pemilu (UU No. 22/2007), untuk memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU dan anggota KPU Provinsi, dibentuk Dewan Kehormatan KPU yang bersifat (*ad hoc*) yang ditetapkan dengan keputusan KPU. Dewan Kehormatan KPU tersebut berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas 3 (tiga) orang anggota KPU dan 2 (dua) orang dari luar anggota KPU.

Dewan Kehormatan KPU terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Dewan Kehormatan KPU menetapkan rekomendasi yang bersifat mengikat. KPU wajib melaksanakan Rekomendasi Dewan Kehormatan KPU.<sup>23</sup>

## **2. Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Dalam Undang-Undang Tentang PILKADA**

Terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan pilukada antara lain disebabkan karena pilukada yang memiliki banyak kekurangan, antara lain terlalu ringannya sanksi atas pelanggaran aturan pilukada serta minimnya pengaturan mengenai pembatasan dan

---

<sup>23</sup> Agus bastoni, *Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum RI No 22 Th.2017* (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), h. 84

transparansi keuangan dana Pemilukada. Filosofi sanksi dari undang-undang pemilu termasuk undang-undang yang menjadi payung hukum pemilukada adalah didasarkan pada anggapan bahwa pemilu adalah pesta demokrasi. Oleh karena itu, sebagai suatu pesta, diperkirakan akan banyak sekali pelanggaran, sehingga sanksi tidak diperberat. Demikian juga, pembatasan dan transparansi keuangan dana kampanye, termasuk atas sanksi pelanggaran tersebut, tidak diatur secara ketat dan dengan sanksi yang ringan karena partai politik menyusun undang-undang ini, tidak menghendaki adanya pengaturan yang mempersulit partai-partai politik dan peserta pemilukada.<sup>24</sup>

Filosofi yang demikian, oleh karena itu tidak dapat dihindari dalam praktik, terjadi pelanggaran-pelanggaran bersifat masif bahkan sistematis dan terstruktur, karena peserta dan kandidat mengetahui pasti bahwa sanksi atau pelanggaran yang dilakukannya, tidak berakibat patal bagi kandidat jikapun ditemukan adanya pelanggaran. Nampak dalam dalam berbagai pemilu tingginya pelanggaran berbanding sama dengan kemenangan suatu partai politik dalam pemilu. Dari ribuan pelanggaran selama pemilukada yang ditemukan atau dilaporkan, sangat sedikit sekali yang dibawa ke pengadilan dan dijatuhi sanksi, walaupun dijatuhi sanksi hal itupun sangat ringan dan tidak memberikan efek khawatir bagi kandidat yang menang dan melakukan pelanggaran.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Hamdan Zoelva, *Op.Cit*, h. 384

<sup>25</sup> Hamdan Zoelva, *Ibid*, h. 387

### C. Pemilukada Dalam Perspektif Islam

Kedudukan dan fungsi Kepala Daerah dalam pandangan Islam adalah sangat penting. Hal ini dapat dipahami dari firman ALLAH disurat An Nisa yang berbunyi sebagai berikut.

Allah SWT berfirman<sup>26</sup>:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”(Q.S An Nisa :59)<sup>27</sup>

Ayat di atas, Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk mentaati Allah, Rasul-Nya dan Ulil Amri. Dalam Tafsir Jalalain diterangkan bahwa Ulil Amri dalam ayat tersebut adalah pemegang urusan pemerintahan, yakni para wali yang menjabat sebagai penguasa wilayah, semacam wali kota maupun gubernur.

Imam Al Mawardi dalam tafsirnya mengutip suatu hadits dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW, bersabda:

<sup>26</sup> <http://www.suara-islam.com/read/index/11960/-Hakikat-Pilkada-dalam-Perspektif-Islam->.02/05/2016, Jam 17:39

<sup>27</sup> Departemen Agama *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung : Penerbit Dipenogoro, 2009), QS. An Nisa : (59), h. 87



مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَى

*Artinya: "Siapa saja yang taat kepadaku maka sungguh berarti dia taat kepada Allah dan siapa saja yang menentangku maka sungguh berarti dia menentang Allah, dan siapa saja menentang amirku maka sungguh berarti dia menentangku".*

Hadits tersebut menerangkan bahwa urusan ketaatan kepada penguasa dalam perspektif Islam tersambung dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Artinya, politik pemerintahan dunia tidak terpisah dengan ajaran Islam yang berdimensi dunia akhirat. Siapapun muslim, baik sebagai rakyat maupun penguasa tidak boleh memisahkan urusan politik dengan urusan agama Islam.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

*Artinya : "Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya"(Q.S Al Imran :159)<sup>28</sup>*

Di dalam hukum Islam tidak ada aturan khusus yang mengatur tentang Pemilihan Kepala Daerah. Hal ini dikarenakan Kepala Daerah di masa klasik

---

<sup>28</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung : Penerbit Dipenogoro, 2009), QS. Al-Imran (159) : 25, h. 71

tidak dipilih melainkan diangkat atau ditunjuk oleh Khalifah meskipun Islam tidak menulis aturan khusus tentang pemilihan kepala daerah namun Islam memiliki prinsip-prinsip pokok yang dapat digunakan sebagai pedoman dengan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah.

Diantara sejumlah prinsip utama dalam masalah Pemilihan pemimpin adalah masalah keadilan. Berkaitan dengan penegakan keadilan kita, dapati Al-Qur'an menetapkan kewajiban berlaku adil terhadap manusia sekalipun dengan menggunakan kekuatan. Allah SWT berfirman:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ  
بِالْقِسْطِ

Artinya : *“Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.” (Q.S Al Hadid : 25)*<sup>29</sup>

Pemahaman dalam ayat ini, Ibnu Taimiyah berkata :”maksud dari mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab, adalah agar manusia berlaku adil dalam menunaikan hak-hak mahluk-Nya, barang siapa yang menyipang dari kitab-Nya, harus diluruskan dengan besi.”

Kezaliman yang dilakukan oleh seorang penguasa dalam syari'at islam wajib dipertanggung jawabkan untuk mencegah kezaliman mereka kembali, sebagaimana yang ditunjukkan oleh nash-nash Al-qur'an dan Hadist-hadist Rosullallah Saw, perihal amar ma'ruf nahi mungkar, atau secara khusus perihal tugas pengawasan atas para pejabat pelaksanaan kewajiban yang merupakan tujuan semua kewenangan Islam.

---

<sup>29</sup> Ibid, QS. Al-Hadid (57) : 25, h. 541

Sunah Allah juga memutuskan bahwa segala perkara manusia dalam dunia yang dilaksanakan dengan sikap adil sekalipun perkara dosa lebih sering sukses dibandingkan perkara yang dilaksanakan dengan sikap zalim sekalipun tidak dalam perkara dosa.<sup>30</sup>

Ada yang berkata : “Sesungguhnya Allah akan menegakkan negara yang adil sekalipun negara yang kafir, dan Dia tidak akan menegakkan negara yg zalim sekali pun itu negara muslim.” Ada juga yang berkata : “dunia akan abadi walaupun bersama kekafiran, dan tidak akan abadi dengan kezaliman walaupun bersama keislaman.”

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa masalah keadilan adalah masalah yang sangat penting baik dikaitkan dengan pemilihan pemimpin maupun dalam menyelesaikan perkara hukum. Sebab keadilan adalah sistem segala sesuatu. Maka apabila perkara dunia dilaksanakan dengan adil, pasti akan sukses sekalipun pelakunya diakhirat kelak tidak mendapat apa-apa, dan apabila tidak dilaksanakan dengan dengan adil pasti tidak akan sukses sekalipun pelakunya di akhirat kelak mendapatkan balasan atas keimanannya.

---

<sup>30</sup> Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam* (Jakarta : Amzah, 2005), h. 20

### **BAB III**

#### **LAPORAN PENELITIAN**

##### **A. Profil Lembaga BAWASLU Provinsi Lampung**

###### **1. Sejarah Pembentukan Lembaga Bawaslu Provinsi Lampung**

Dalam sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia, istilah pengawasan pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980-an. Pada pelaksanaan pemilu yang pertama dilaksanakan di Indonesia pada 1955 belum dikenal istilah pengawasan pemilu. Pada era tersebut terbangun *trust* di seluruh peserta dan warga negara tentang penyelenggaraan pemilu yang dimaksudkan untuk membentuk lembaga parlemen yang saat itu disebut sebagai Konstituante.

Walaupun bertentangan ideologi pada saat itu cukup kuat, tetapi dapat dikatakan sangat minim terjadi kecurangan dalam pelaksanaan tahapan, walaupun ada gesekan terjadi diluar wilayah pelaksanaan pemilu. Gesekan yang muncul merupakan konsekuensi logis pertarungan ideologi pada saat itu.

Hingga saat ini masih muncul keyakinan bahwa pemilu 1955 merupakan pemilu di Indonesia paling ideal. Kelembagaan pengawas pemilu baru muncul pada pelaksanaan pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Panitia Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pada saat itu sudah mulai muncul *distrust* terhadap pelaksanaan pemilu yang mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa. Pembentukan Panwaslak pemilu pada pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan

manipulasi perhitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada pemilu 1971.

Pelanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi pada pemilu 1977 jauh lebih masif. Protes-protes ini lantas direspon pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya munculla gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan kualitas Pemilu 1982. Demi memenuhi tuntutan PPP dan PDI, pemerintah setuju dengan untuk menepatkan wakil peserta pemilu kedalam kepanitian pemilu. Selain itu, pemerintah juga mengintroduksi adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU).<sup>31</sup>

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum. (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir campur tangan penguasa dalam pelaksanaan pemilu mengingat penyelenggara sebelumnya, yakni LPU, merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelum Departemen Dalam Negeri). Disisi lain lembaga pengawas pemilu juga berubah momenklatur dari Panwaslak Pemilu menjadi panitia Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

---

<sup>31</sup> Tim Penyusun, Profil Lembaga Bawaslu Provinsi Lampung

Perubahan mendasar terkait kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Menurut UU ini dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu dibentuk sebuah lembaga (*ad hoc*) terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Kecamatan. Selanjutnya kelembagaan kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU).

Aparatur Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan berada sampai dengan tingkat kelurahan/desa dengan urutan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) ditingkat kelurahan/desa. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, sebagian kewenangan dalam pembentukan Pengawas Pemilu merupakan kewenangan dari KPU.

Namun selanjutnya berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap *judicial review* yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, rekrutmen Pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu, kewenangan utama dari Pengawas Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk mengawasi tahapan Pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik.



Dinamika kelembagaan pengawas pemilu ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilu. Secara kelembagaan Pengawas Pemilu dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat Provinsi dengan nama Badan Pengawas Provinsi Lampung (Bawaslu Provinsi). Selain itu pada bagian kesekretariatan Bawaslu juga didukung oleh unit kesekretariatan eselon 1 dengan nomenklatur Sekretariatan Jenderal Bawaslu.

Bawaslu Provinsi Lampung terbentuk pada Tahun 2012 yang beraanggotakan tiga orang, satu orang ketua dan dua orang anggota.

Ketua Bawaslu : Nazarudin, S.IP

Anggota : Fatikhatul Khoiriah, S.H.I, M.H

Anggota : Ali Sidiq, S.Sos

Bawaslu Provinsi Lampung memiliki tiga Divisi yaitu Divisi Pengawasan, Divisi Hukum, dan Penindakan Pelanggaran dan Terakhir Divisi SDM dan Organisasi. Selanjutnya Bawaslu Membentuk Kesekretariatan pada Tahun 2013 yang dipimpin oleh kepala kesekretariatan dan tiga sub bagian;

Kepala Sekretariatan : E. Dwi Mulyono

Kasubbag Administrasi : Kuantanti Puji Rahayu

Kasubag Hukum, Humas dan Antar Lembaga : Indra Darmawan, S.IP

Kasubag Pengawasan : Erwin Prima Rinaldo, S.IP

Kemudian Bawaslu Provinsi Lampung mengganti pimpinan Bawaslu pada tahun 2014.

Ketua Bawaslu : Fatikhatul Khoiriah, S.H.I, M.H

Anggota : Nazarudin, S.I

Anggota : Ali Sidiq, S.Sos

## **2. Susunan Organisasi**

### **a. Kedudukan**

Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum yang umumnya disebut Sekretariat Jenderal Bawaslu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu. Sekretariat Jenderal Bawaslu dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.<sup>32</sup>

### **b. Tugas dan Fungsi**

Sekretariat Jenderal Bawaslu mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Bawaslu. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Jenderal Bawaslu menyelenggarakan fungsi:

- 1) Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan.
- 2) Pemberian dukungan administratif kepada Bawaslu.

---

<sup>32</sup> Perbawaslu RI, No. 23 Tahun 2003 Organisasi Bawaslu, h. 18

- 3) Pembinaan dan pelaksanaan perencanaan dan pengawasan internal, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, serta pengelolaan keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu.

**c. Susunan Organisasi**

Sekretariat Jenderal Bawaslu terdiri atas:

**1) Biro Administrasi**

Biro Administrasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pelaksanaan urusan umum, dan administrasi sumber daya manusia. Dalam melaksanakan tugas Biro Administrasi menyelenggarakan fungsi:

- a) Pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran Bawaslu dan DKPP.
- b) Pengelolaan keuangan.
- c) Pengelolaan persuratan, arsip, rumah tangga dan perlengkapan, serta keprotokolan.
- d) Pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia dan ketatausahaan pimpinan.

Biro Administrasi terdiri atas:

- a) Bagian Perencanaan

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi, penyiapan dan penyusunan

rencana program dan anggaran, serta monitoring dan evaluasi kinerja program dan anggaran.

b) Bagian Keuangan

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis dan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, serta verifikasi dan akuntansi.

c) Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan dan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik negara, dan keprotokolan.

d) Bagian Sumber Daya Manusia dan Tata Usaha Pimpinan.

Bagian Sumber Daya Manusia dan Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi sumber daya manusia aparatur Pengawas Pemilu, Sekretariat Jenderal Bawaslu dan Sekretariat Bawaslu Provinsi, serta urusan tata usaha pimpinan Bawaslu dan Sekretaris Jenderal.

**2) Biro Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu**

Biro Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan sosialisasi, fasilitasi teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu, pengelolaan temuan dan laporan pelanggaran Pemilu, serta administrasi penyelesaian sengketa Pemilu. Dalam melaksanakan tugas, Biro

Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan pelaksanaan dan evaluasi sosialisasi pengawasan Pemilu.
- b) Pelaksanaan urusan fasilitasi teknis dan supervisi penyelenggaraan Pengawasan Pemilu.
- c) Pengelolaan temuan dan laporan pelanggaran Pemilu.
- d) Pelaksanaan urusan fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu.

Biro Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu terdiri atas:

- a) Bagian Sosialisasi

Bagian Sosialisasi mempunyai tugas melaksanakan urusan fasilitasi pelaksanaan sosialisasi, evaluasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu, dan melaksanakan urusan tata usaha Biro.

- b) Bagian Teknis Pengawasan Pemilu.

Bagian Teknis Pengawasan Pemilu mempunyai tugas melaksanakan urusan fasilitasi teknis dan supervisi penyelenggaraan pengawasan Pemilu.

- c) Bagian Temuan dan Laporan Pelanggaran.

Bagian Temuan dan Laporan Pelanggaran mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan temuan dan laporan pelanggaran Pemilu.

d) Bagian Penyelesaian Sengketa.

Bagian Penyelesaian Sengketa mempunyai tugas melaksanakan urusan fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu

**3) Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Pengawasan Internal**

Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Pengawasan Internal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan, analisis hukum, analisis teknis pengawasan dan potensi pelanggaran, hubungan masyarakat dan kerjasama antar lembaga, serta melaksanakan urusan pengawasan internal. Dalam melaksanakan tugas, Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Pengawasan Internal menyelenggarakan fungsi:

- a) Koordinasi dan penyusunan rancangan, serta analisis peraturan perundangundangan pengawasan Pemilu.
- b) Penyiapan pertimbangan dan bantuan hukum, serta desiminasi peraturan perundang-undangan pengawasan Pemilu.
- c) Pelaksanaan sistem jaringan dokumentasi dan informasi (SJDI) hukum.
- d) Pelaksanaan urusan analisis teknis pengawasan dan potensi pelanggaran Pemilu.



- e) Pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan kerjasama antar lembaga.
- f) Pelaksanaan urusan pengawasan internal di lingkungan Bawaslu dan jajarannya serta DKPP.

Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Pengawasan Internal terdiri atas:

- a) Bagian Hukum.

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rancangan, serta analisis peraturan perundang-undangan pengawasan Pemilu, penyiapan pertimbangan dan bantuan hukum, desiminasi peraturan perundang-undangan pengawasan Pemilu, serta melaksanakan SJDI hukum.

- b) Bagian Analisis Teknis Pengawasan dan Potensi Pelanggaran.

Bagian Analisis Teknis Pengawasan dan Potensi Pelanggaran, mempunyai tugas melaksanakan analisis teknis pengawasan dan potensi pelanggaran Pemilu.

- c) Bagian Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga.

Bagian Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga, mempunyai tugas melaksanakan urusan hubungan masyarakat dan kerjasama antar lembaga.

d) Bagian Pengawasan Internal dan Tata Laksana.

Bagian Pengawasan Internal dan Tata Laksana, mempunyai tugas melaksanakan urusan pengawasan internal di lingkungan Bawaslu dan jajarannya serta DKPP, pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana, serta tata usaha Biro.

**4) Biro Administrasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)**

Biro Administrasi DKPP mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi perkara pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Dalam melaksanakan tugas, Biro Administrasi DKPP menyelenggarakan fungsi:

- a) Pelaksanaan urusan administrasi umum, koordinasi penyusunan perencanaan program dan anggaran, ketatausahaan, keprotokolan, publikasi dan sosialisasi, serta monitoring dan evaluasi di lingkungan DKPP.
- b) Pelaksanaan urusan administrasi pengaduan pelanggaran kode etik.
- c) Pelaksanaan urusan administrasi persidangan pelanggaran kode etik.

Biro Administrasi DKPP terdiri atas:

- a) Bagian Administrasi Umum.

Bagian Administrasi Umum, mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum, koordinasi penyusunan perencanaan program dan anggaran,

ketatausahaan, keprotokolan, publikasi dan sosialisasi, serta monitoring dan evaluasi dilingkungan DKPP.

b) Bagian Administrasi Pengaduan.

Bagian Administrasi Pengaduan, mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi pengaduan pelanggaran kode etik.

c) Bagian Administrasi Persidangan.

Bagian Administrasi Persidangan, mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi persidangan pelanggaran kode etik.<sup>33</sup>

### 3. Tata Kerja

Sekretaris Jenderal Bawaslu, Kepala Biro, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota, Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi staf masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib bertanggungjawab memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas staf masing-masing.

---

<sup>33</sup> Perbawaslu RI, *Ibid*, h. 19

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada pimpinan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari staf wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan bahan pemberian petunjuk kepada stafnya. Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan-satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan unit organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya dan wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada staf.<sup>34</sup>

#### **4. Visi dan Misi Lembaga Bawaslu Provinsi Lampung**

Visi lembaga Bawaslu Provinsi Lampung adalah “Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas”. Berdasarkan visi Bawaslu Provinsi Lampung yang telah ditetapkan maka selain visi Lembaga Bawaslu Provinsi Lampung juga mempunyai Misi sebagai berikut :

- a. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid.
- b. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien.

---

<sup>34</sup> Perbawaslu RI, *Ibid*, h. 22

- c. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi.
- d. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif.
- e. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan.
- f. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.<sup>35</sup>

##### **5. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu Provinsi Lampung**

Tugas, wewenang, dan juga kewajiban dari Pengawas Pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Pemilu adalah sebagai berikut:

- a. Mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu.
- b. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu.
- c. Mengawasi pelaksanaan Putusan Pengadilan.
- d. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen.
- e. Memantau atas pelaksanaan tindak lanjut penanganan pelanggaran pidana Pemilu.

---

<sup>35</sup> Tim Penyusun, Profil Lembaga Bawaslu Provinsi Lampung

- f. Mengawasi atas pelaksanaan putusan pelanggaran Pemilu.
- g. Evaluasi pengawasan Pemilu.
- h. Menyusun laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilu.
- i. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan yang menjadi wewenang dari Pengawas Pemilu adalah sebagai berikut:

- a. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu.
- b. Menerima laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dan mengkaji laporan dan temuan, serta merekomendasikannya kepada yang berwenang.
- c. Menyelesaikan sengketa Pemilu.
- d. Membentuk, mengangkat dan memberhentikan Pengawas Pemilu di tingkat bawah.
- e. Melaksanakan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang menjadi kewajiban Pengawas Pemilu adalah sebagai berikut:

- b. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan
- d. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu



- e. Menyampaikan laporan hasil pengawasan sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan; dan
- f. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Bahwa disamping dibentuknya panitia adhoc Panwaslu/Panwaslih ditingkat kabupaten dan kota, maka pada tingkat kecamatan juga akan dibentuk panitia pengawas yang sering disebut dengan panwascam atau panwaslihcam. Adapun yang menjadi tugas dan wewenang dari Panwaslu/Panwaslih Kecamatan adalah sebagai berikut:

- a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di wilayah kecamatan yang meliputi:
  - 1) Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap.
  - 2) Pelaksanaan kampanye.
  - 3) Logistik Pemilu dan pendistribusiannya.
  - 4) Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilu.
  - 5) Pergerakan surat suara dari TPS sampai ke PPK.
  - 6) Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK dari seluruh TPS; dan
  - 7) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan.
- b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a:

- 1) Menyampaikan temuan dan laporan kepada PPK untuk ditindaklanjuti.
- 2) Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang.
- 3) Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu.
- 4) Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan mengenai tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu.
- 5) Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan yang menjadi kewajiban dari para Panwaslu/Panwaslih Kecamatan:

- a. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
- b. Menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan.
- c. Menyampaikan laporan pengawasan atas tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya kepada Panwaslu Kabupaten/Kota.
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran

yang dilakukan oleh PPK yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kecamatan.

- e. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian seterusnya sampai pada tingkat Kelurahan/Desa akan dibentuk panitia adhoc Panitia Pengawas Lapangan (PPL) dan ditingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) nantinya juga akan dibentuk Panitia Pengawas TPS. Dimana tugas dan wewenangnya adalah disesuaikan dengan tingkat wilayah yang menjadi kewenangannya.<sup>36</sup>

## **B. Pelanggaran Tindak Pidana Pemilukada di Kabupaten Pesisir Barat dan Cara Penyelesaiannya**

### **1. Bentuk-bentuk Pelanggaran**

Pelanggaran tindak pidana pemilihan yang ditemukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum di Kabupaten Pesisir Barat ada 2 bentuk : Pertama, tindak pidana perampasan C-1 Plano dan yang kedua adalah dugaan Money Politik.

Adapun rincian kronologis dari masing-masing tindak pidana dimaksud adalah sebagaimana diuraikan berikut ini.

#### **a. Pelanggaran Pidana Perampasan C-1 Plano**

Pada hari Rabu, 9 Desember 2015 di Kecamatan Bengkunt Belimbing, saudara Fazari mendapatkan informasi bahwa di TPS 1

---

<sup>36</sup> Perbawaslu RI, *Op.Cit*, h. 2

yaitu dipekon Pemerihan, Bengkunt Kecamatan Belimbing telah terjadi Perampasan C-1 Plano oleh seseorang bernama Warisin yang diduga Tim pasangan calon nomor 4 ( KRT. Oking Ganda Miharja, SH. dan Irawan Topani, SH, MKn).

Atas dasar fakta tersebut, saudara M. Fazari melaporkan kejadian tersebut kepada PANWASKAB Kabupaten Pesisir Barat bernama Albert Surya Perbaysa S.Psi dan laporannya diterima serta dibuatkan berkas Pengaduan dengan Nomor Laporan 005/LP/PANWAS-PB/XII/2015, Tanggal laporan 11 Desember 2015, Pelapor M. Fazari, Terlapor Tim Paslon no.4 Warisin.

b. Pelanggaran Pidana Money Politik

Adapun mengenai pelanggaran tindak pidana politik uang peristiwanya adalah sebagai berikut :

Pada hari Selasa 8 Desember 2015 sekitar pukul 09.00 WIB, Pelapor, bernama Husen Effendi, memperoleh informasi bahwa seorang anggota Tim Relawan pemenangan pasangan calon AGUS-ERLINA bernama Sobirin datang kerumah-rumah penduduk dan membawa SK TIM sebanyak 2 lembar. Selain dari SK tersebut, Sobirin juga menyerahkan uang pecahan Rp. 50.000 sebanyak 2 lembar dan berpesan kepada penerimanya : “jangan lupa coblos nomor 1”.

Merasa bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran pidana pemilu (*Money Politik*) maka Husen Efendi melaporkan

kejadian tersebut ke PANWASKAB Kabupaten Pesisir Barat. Laporan ini diterima oleh Albert Surya Perbaysa S.Psi. dan didokumentasikan dalam bentuk laporan pengaduan No : 007/LP/PANWAS-PB/XII/2015, tanggal 11 Desember 2015. Pelapor HUSEN EFENDI, Terlapor SOBIRIN.<sup>37</sup>

## 2. Mekanisme Penyelesaian Perkara

### a. Terhadap kasus Perampasan C-1 Plano

Sesuai dengan tugas, peran dan fungsinya sebagai lembaga Pengawas, Panwas Kabupaten Pesisir Barat, selaku pelaksana tugas Bawaslu di Kabupaten, menindaklanjuti laporan pelanggaran tindak pidana yang terjadi di wilayahnya.

Sebagai langkah awal, Pada hari pertama (1 hari sesudah laporan diterima) Panwas melakukan klarifikasi kepada pelapor yaitu sdr. M. Fazari, untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang peristiwa yang terjadi berikut alat-alat bukti yang diajukan. Klarifikasi dilakukan pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2015 (1 hari sesudah laporan diterima) dan dilakukan di ruang Sekretariat PanwasKab di Jl. Raden Anom Pekon Rawas, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat. Dalam klarifikasi tersebut Saksi pelapor telah diambil sumpah dan menyatakan bahwa keterangannya adalah benar sebagaimana adanya.

---

<sup>37</sup> Dokumentasi Bawaslu Provinsi Lampung.

Pada keesokan harinya, hari ke 2 (dua), Panwas melakukan kajian dan penelaahan di lapangan untuk memperoleh fakta terhadap dugaan pengambilan model C1 Plano yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal. Sayangnya, meski C-1 Plano dapat ditemukan di tangan sdr. Warisin, tetapi karena orang yang disangka melakukan tindak pidana tidak dapat diidentifikasi, termasuk tidak ada saksi-saksi lain yang mendukung pembuktian, maka Panwas Kabupaten Pesisir Barat menyatakan bahwa laporan nomor 005/TM/PANWASKAB-PBXII/2015 tidak memenuhi unsur pidana Karena tidak memenuhi alat bukti. Untuk itu, Panwas Kabupaten Pesisir Barat merekomendasikan agar kasus ini ditutup.

b. Terhadap dugaan Tindak Pidana Money Politik

Seperti halnya dengan penyelesaian perkara pada poin a di atas, fihak Panwas Kabupaten Pesisir Barat melakukan klarifikasi terhadap pelapor, yakni Sdr. Husnen Effendi, menyangkut isi laporan yang telah disampaikan ke Panwas. Klarifikasi tersebut dilakukan pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2015 (1 hari sesudah laporan diterima) dan dilakukan di ruang Sekretariat PanwasKab di Jl. Raden Anom Pekon Rawas, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat. Dalam klarifikasi tersebut Saksi pelapor telah diambil sumpah dan menyatakan bahwa keterangannya adalah benar sebagaimana adanya.



Pada hari ke-2, Panwas melakukan klarifikasi kepada terlapor berikut SK TIM melawan pemenangan paslon AGUS-ERLINA sebanyak dua lembar dan uang tunai pecahan sebanyak Rp. 50.000 sebanyak 2 lembar. Namun Terlapor membantah telah melakukan tindak Pidana yang dituduhkan.

Hari ke 3 (tiga) setelah dilakukan kajian dan penelaahan terhadap dugaan pelanggaran money politik, Panwas Kabupaten Pesisir Barat menyatakan bahwa bahwa keterangan pelapor tidak cukup bukti atau tidak memenuhi unsur karena tidak ada saksi lain yang melihat sdr. Sobirin melakukan tindak pidana money politik tersebut.<sup>38</sup>



---

<sup>38</sup> Dokumentasi Bawaslu Provinsi Lampung.

**BAB IV**  
**PROSES PENYELESAIAN MENURUT HUKUM POSITIF**  
**DAN HUKUM ISLAM**

**A. Tinjauan Tentang Proses Penyelesaian**

**1. Terhadap kasus Perampasan C-1 Plano**

Sesuai dengan tugas, peran dan fungsinya sebagai lembaga Pengawas, Panwas Kabupaten Pesisir Barat, selaku pelaksana tugas Bawaslu di Kabupaten, menindaklanjuti laporan pelanggaran tindak pidana yang terjadi di wilayahnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 178E Undang-undang No.10 Tahun 2016 tentang menindaklanjuti laporan pelanggaran tindak pidana.

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar, mengubah, merusak, menghilangkan hasil pemungutan dan/atau hasil pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 48 (empat puluh delapan) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dan paling banyak Rp. 144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah).

Dalam hal ini tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyelenggara Pemilihan dan/atau saksi pasangan calon dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ancaman pidana maksimumnya.

Sebagaimana telah diketengahkan pada bagian terdahulu bahwa sesudah menerima laporan Panwas melakukan klarifikasi dari pelapor yakni saudara M.Pazari, untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang peristiwa yang terjadi berikut alat-alat bukti yang diajukan. Klarifikasi dilakukan pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2015 (1 hari sesudah laporan diterima) dan dilakukan di ruang Sekretariat PanwasKab di Jl. Raden Anom Pekon Rawas, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat. Dalam klarifikasi tersebut Saksi pelapor telah diambil sumpah dan menyatakan bahwa keterangannya adalah benar sebagaimana adanya. Tahapan yang dilakukan Panwas ini sesuai dengan ketentuan pasal 7 Perbawaslu No.8 Tahun 2015 – Undang-undang No.10 Tahun 2016.

Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota dapat menghadirkan lembaga sebagai pihak pemberi keterangan yang dibutuhkan dalam penyelesaian sengketa Pemilihan.

Pihak pemberi keterangan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) didengar keterangannya berdasarkan :

- a. permintaan Pemohon atau Termohon kepada Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota.
- b. kebutuhan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota.

Pihak pemberi keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didengar keterangannya dalam pemeriksaan untuk menjelaskan fakta, data, dan informasi terkait dengan kewenangannya dalam proses penyelenggaraan Pemilihan. Pemberi keterangan yang mewakili lembaga

dalam memberikan keterangan pada penyelesaian sengketa Pemilihan wajib menunjukkan surat tugas dari pimpinan lembaga.

Tahap berikutnya, Panwas melakukan kajian dan penelaahan di lapangan untuk memperoleh fakta.

Musyawarah yang telah mencapai kesepakatan dituangkan dalam berita acara kesepakatan musyawarah yang ditandatangani oleh Pemohon, Termohon, dan pimpinan musyawarah. Kesepakatan yang diambil oleh Pemohon atau Termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Berita acara kesepakatan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam :

- a. Keputusan Bawaslu Provinsi yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Provinsi untuk penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- b. Keputusan Panwas Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh Ketua Panwas Kabupaten/Kota untuk penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, dengan melampirkan berita acara kesepakatan musyawarah.

Dalam hal musyawarah tidak mencapai kesepakatan, Pimpinan musyawarah menuangkan hasil musyawarah dalam berita acara musyawarah. Dalam hal sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kesepakatan, Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota membuat keputusan. Keputusan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dengan mempertimbangkan keterangan Pemohon,Termohon, pihak terkait, lembaga pemberi keterangan, serta bukti-bukti yang dikemukakan dalam musyawarah. Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam :

- a. Keputusan Bawaslu Provinsi yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi untuk penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- b. Keputusan Panwas Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten/Kota untuk penyelesaian sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Didalam hukum Islam, tindakan perampasan disebut *ghasab*. Kata *Ghasab* menurut bahasa mempunyai makna mengambil sesuatu secara paksa dan terang terangan, sedangkan menurut syara' *Ghasab* ialah menguasai hak orang lain dengan jalan aniaya atau memanfaatkan atau menggunakan hak orang lain tanpa seijin pemiliknya. *Ghasab* tidak terbatas pada perkara yang berupa harta benda, tetapi juga hal - hal yang berupa kemanfaatan, seperti : menyuruh berdiri orang yang sedang duduk di masjid, duduk diatas alas (karpet, permadani) orang lain sekalipun tidak digeser ketempat lain , mengusir orang dari rumahnya sendiri sekalipun tidak dimasukinya dan lain.

Sedangkan menurut ulama, *ghasab* mendefinisikan sebagai berikut:

1. Mazhab Hanafi : mengambil harta orang lain yang halal tanpa ijin, sehingga barang tersebut berpindah tangan dari pemiliknya

2. Ulama Mazhab Maliki : mengambil harta orang lain secara paksa dan sengaja (bukan dalam arti merampok)
3. Ulama Mazhab Syafi'i dan Hanbali : penguasaan terhadap harta orang lain secara sewenang-wenang atau secara paksa tanpa hak.

Adapun dasar hukum *ghasab* sesuai dengan Firman Allah SWT sebagai berikut :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.* (Q.S.An Nisa :29)

Dasar hukum *ghasab* juga terdapat pada hadist Nabi Muhammad SAW :

*“Darah dan harta seseorang haram bagi orang lain. (HR Bukhari dan Muslim dari Abi Bakrah).*

*“Harta seorang muslim haram dipergunakan oleh muslim lainnya, tanpa kerelaan hati pemiliknya. (HR.Daruquthni dari Anas bin Malik).*

Bagi orang yang mengghasab harta seseorang, maka wajib mengembalikan kepada pemiliknya, meskipun *ghasib* (orang yang melakukan *ghasab*) itu terkena tanggungan (mengganti) dengan berlipat ganda harganya. Juga wajib bagi nya untuk menambah kekurangannya. Jika memang terdapat kekurangan pada harta yang di *ghasab*. Seperti



contoh orang yang mengghasab pakaian kemudian dia memakainya, atau harta itu berkurang tidak karena dipakai.maka wajib memberikan biaya yang sama. Sedangkan jika *maghsab* (barang yang di *ghasab*) itu berkurang sebab harganya menjadi turun, menurut pendapat yang shahih, *ghasib* tidak wajib menanggung nya.

Di dalam sebagian keterangan dijelaskan bahwa siapa saja yang mengghasab harta seseorang, maka dia harus dipaksa untuk mengembalikannya. Apabila barang yang di *ghasab* itu rusak, maka *ghasib* wajib menanggungnya dengan jumlah yang sama dengan barang yang di *ghasab* tersebut. adapun yang lebih sah bahwa barang itu adalah barang - barang yang dapat di ukur dengan takaran atau timbangan (dapat di ukur dengan nilai). Harga *maghsab* dapat berbeda beda dengan bentuk harga yang lebih tinggi dari hari pada saat barang tersebut di *ghasab* sampai pada hari kerusakan barang yang di *ghasab*. *Ghasib* (orang yang meng-*ghasab*) dapat menjadi bebas setelah mengembalikan barang *maghsab* (barang yang di *ghasab*) kepada pemiliknya dan cukup meletakkan di sebelah pemiliknya. Apabila di lupa siapa pemiliknya, maka cukup dengan menyerahkannya kepada Qodli (hakim). Sedangkan menurut dari ulama' dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Ia berdosa jika ia mengetahui bahwa barang yang diambilnya tersebut milik orang lain.
2. Jika barang tersebut masih utuh wajib dikembalikannya.
3. Apabila barang tersebut hilang/rusak karena dimanfaatkan maka ia dikenakan denda.

## **2. Terhadap dugaan Tindak Pidana Money Politik**

Sesuai dengan tugas, peran dan fungsinya sebagai lembaga Pengawas, Panwas Kabupaten Pesisir Barat, selaku pelaksana tugas Bawaslu di Kabupaten, menindaklanjuti laporan pelanggaran tindak pidana yang terjadi di wilayahnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 187 Undang-undang No.10 Tahun 2016. Dalam Pasal 187A berbunyi :

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
2. Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam Pasal 187B berbunyi : Anggota Partai Politik atau anggota gabungan Partai Politik yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses

pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dalam Pasal 187C berbunyi : Setiap orang atau lembaga yang terbukti dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan pidana penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dalam Pasal 187D berbunyi : Pengurus lembaga pemantau Pemilihan yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Seperti halnya dengan penyelesaian perkara pada poin a di atas, pihak Panwas Kabupaten Pesisir Barat melakukan klarifikasi terhadap pelapor, yakni Sdr. Husnen Effendi, menyangkut isi laporan yang telah disampaikan ke Panwas. Klarifikasi tersebut dilakukan pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2015 (1 hari sesudah laporan diterima) dan dilakukan di ruang Sekretariat PanwasKab di Jl. Raden Anom Pekon Rawas, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat. Dalam klarifikasi tersebut Saksi pelapor telah diambil sumpah dan menyatakan bahwa keterangannya adalah benar sebagaimana adanya.

Pada hari ke-2, Panwas melakukan klarifikasi kepada terlapor berikut SK TIM relawan pemenangan paslon AGUS-ERLINA sebanyak dua lembar dan uang tunai pecahan sebanyak Rp. 50.000 sebanyak 2 lembar. Namun Terlapor membantah telah melakukan tindak Pidana yang dituduhkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) Perbawaslu No.13 Tahun 2015 – Undang-undang No.10 Tahun 2016.

Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Panwas Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota melaksanakan pengawasan persiapan Kampanye.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan :

- a. penyusunan jadwal waktu dan lokasi Kampanye oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan berdasarkan hasil koordinasi dengan pasangan calon dan pemerintah daerah.

- b. penetapan jadwal waktu dan lokasi Kampanye dilakukan secara adil dan proporsional.
- c. perencanaan pencetakan bahan Kampanye dilaksanakan sesuai dengan jumlah kepala keluarga pada daerah Pemilihan untuk setiap pasangan calon.
- d. tim kampanye Pasangan Calon terdaftar di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota serta tidak terdapat pihak yang dilarang sebagai tim kampanye dalam daftar tim kampanye.

Hari ke 3 (tiga) setelah dilakukan kajian dan penelaahan terhadap dugaan pelanggaran money politik. Hal ini untuk melaksanakan bunyi pasal 13 Perbawalu No.13 Tahun 2015 – Undang-undang No.10 Tahun 2016.

Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS dalam melakukan pengawasan keterlibatan penyelenggara negara dengan cara :

- a. mencatat penyelenggara negara yang kemungkinan menyalahgunakan kewenangan, penggunaan anggaran, dan penggunaan fasilitas Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- b. mendeteksi adanya upaya mobilisasi pemilih oleh penyelenggara negara.
- c. mengawasi netralitas penyelenggara Pemilihan dan aparatur pemerintahan setempat selama melaksanakan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara.

Dalam hal terjadi pelanggaran oleh penyelenggara Pemilihan atau aparatur pemerintahan, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Panwas Kabupaten Pesisir Barat menyatakan bahwa bahwa keterangan pelapor tidak cukup bukti atau tidak memenuhi unsur karena tidak ada saksi lain yang melihat sdr. Sobirin melakukan tindak pidana money politik tersebut. Untuk itu, Panwas Kabupaten Pesisir Barat merekomendasikan agar kasus ini ditutup.

Dari fakta yang telah diuraikan diatas nampak jelas bahwa apa yang dilakukan oleh Panwaslu Pesisir Barat memenuhi ketentuan perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan penanganan perkara tindak pidana pemilu.

*Risywah* politik atau suap politik dalam konteks ini adalah terkait dengan pemilihan calon tertentu untuk menduduki jabatan tertentu, seperti presiden, gubernur, bupati maupun anggota dewan. Modusnya bisa bermacam-macam, seperti pemberian transport kepada pemilih, ganti ongkos kerja, atau kompensasi meninggalkan kerja yang dimaksudkan agar penerima memilih calon tertentu. Bahkan bukan sekadar ini saja, tetapi ada juga modusnya dengan memberikan zakat atau sedekah agar penerima memilih calon tertentu. Modus pertama, yaitu pemberian atas nama penggantian transport, ongkos kerja atau kompensasi meninggalkan kerja diputuskan bahwa hal tersebut masuk ke dalam kategori suap (*risywah*).<sup>39</sup> Sedangkan dalam modus kedua, yaitu pemberian zakat atau sedekah untuk tujuan agar pihak penerima memilih calon tertentu hukumnya *ditafsil*.

---

<sup>39</sup> PBNU, *Hasil Keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2012*, (dalam Marzuki Wahid & Hifdzil Alim), *Jihad NU Melawan Korupsi*, Lakpesdam PBNU, Jakarta Selatan 2016, h.140



Jika pemberian zakat atau sedekah dimaksudkan agar pihak penerima memilih calon tertentu, maka hukumnya adalah haram, karena termasuk *risywah*. Lain halnya jika terdapat tujuan ganda, yaitu memang berniat untuk membayar zakat atau memberi sedekah sekaligus juga berniat agar penerimanya memilih calon tertentu, maka zakat atau sedekahnya tetap sah, tetapi pahalanya tidak sempurna, dan sesuai perbandingan antara dua maksud tersebut.<sup>40</sup>

Lantas, bagaimana jika pihak pemberi tidak menyampaikan secara lisan bahwa pemberiannya itu agar pihak penerima memilih calon tertentu, maka jika penerima itu mengetahui maksud pihak pemberi, maka hukumnya adalah haram menerima pemberian tersebut. Namun, jika tidak mengetahuinya, maka hukumnya adalah mubah. Namun jika suatu saat pihak penerima mengetahui ternyata apa yang pernah diberikan itu tujuannya agar memilih calon tertentu, maka ia harus mengembalikannya.<sup>41</sup>

## **B. Tinjauan Tentang Hasil**

### **1. Terhadap kasus Perampasan C-1 Plano**

Dilihat dari kasus terhadap Perampasan C-1 Plano sesuai dengan tugas, peran, dan fungsinya sebagai lembaga Pengawas, Panwas Kabupaten Pesisir Barat, selaku pelaksana tugas Bawaslu di Kabupaten, menindaklanjuti laporan pelanggaran yang terjadi diwilayahnya. Dari

---

<sup>40</sup> *Ibid*

<sup>41</sup> *Ibid*

kasus diatas, maka disimpulkan kasus ini tidak diteruskan, karena tidak cukup bukti termasuk tidak ada saksi dan tidak dapat diidentifikasi karena dilakukan oleh orang yang tidak dikenal. Panwas Kabupaten Pesisir Barat merekomendasikan agar kasus ini ditutup. Namun Pelanggaran-pelanggaran tersebut telah diselesaikan oleh Panwaslu setempat dengan putusan tidak memenuhi syarat, karenanya tidak dapat dilanjutkan ketahap pengadilan. Menurut undang-undang penyelesaian perkara tersebut diatas telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur penyelesaian yang ditetapkan.

Di dalam Hukum Islam Perampasan disebut *ghasab*. Hukuman bagi yang melakukan perbuatan *ghasab* adalah dosa dan haram, akan tetapi tidak sampai membatalkan shalatnya. Istilahnya adalah sesuatu yang pada mulanya disyariatkan, akan tetapi disertai oleh suatu yang bersifat mudharat bagi manusia. Sayidina Ali as. Berkata kepada Kumail, *“Wahai Kumail, lihatlah di mana dan pada apa kamu salat. Jika itu didapatkan bukan dengan cara yang benar maka tidak diterima shalatnya. Al-ghasab haram dilakukan dan berdosa bagi yang melakukannya, firman Allah SWT:*

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا

فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya : *“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta*

*benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah : 188).*

Adapun hukuman bagi orang yang *ghasab* adalah sebagai berikut:

1. Hukum seluruh macam *ghasab* adalah haram dan terhitung sebagai dosa besar.
2. Jika seseorang meng*ghasab* sesuatu, maka selain telah berbuat haram, dia juga harus mengembalikannya kepada pemiliknya, dan jika barang yang dighasa-nya hilang, dia harus menggantinya.
3. Jika dia merusakkan barang yang dighasabnya, dia harus mengembalikan kepada pemiliknya berikut ongkos perbaikan. Jika setelah perbaikan harganya menjadi lebih murah dari harga sebelumnya, dia harus membayar selisih harganya.
4. Jika dia mengubah barang yang dighasabnya menjadi lebih bagus- misalnya dia memperbaiki sepeda yang dighasabnya menjadi lebih bagus lalu pemiliknya menuntutnya agar mengembalikan sepeda ini apa adanya, maka dia harus menyerahkannya kepada pemiliknya dan tidak boleh meminta ongkos perbaikan juga tidak berhak untuk mengubahnya lagi seperti semula.
5. Apabila yang dighasabnya berbentuk sebidang tanah, kemudian dibangun rumah di atasnya, atau tanah itu dijadikan lahan pertanian, maka jumhur ulama sepakat mengatakan bahwa tanah itu harus dikembalikan. Rumah dan tanaman yang ada di atasnya dimusnahkan atau dikembalikan kepada orang yang dighasab. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW “*Jerih payah yang dilakukan dengan cara aniaya (lalim) tidak berhak diterima oleh orang yang melakukan*

*(perbuatan aniaya) tersebut.”* (HR Daruqutni dan Abu Daud dari Urwah bin Zubair).

Dalam kasus perampasan C-1 Plano yang telah terjadi, jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam, maka perampasan tersebut merupakan suatu perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT dan dapat dihukum sesuai dengan hukum Islam yang berlaku.

### **1. Terhadap dugaan Tindak Pidana Money Politik**

Dalam hal terjadi pelanggaran oleh penyelenggara Pemilihan atau aparatur pemerintahan, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Panwas Kabupaten Pesisir Barat menyatakan bahwa keterangan pelapor tidak cukup bukti. Pelanggaran-pelanggaran tersebut telah diselesaikan oleh Panwaslu setempat dengan putusan tidak memenuhi syarat karenanya tidak dapat dilanjutkan ketahap pengadilan. Tetapi kasus ini termasuk pelanggaran tindak pidana karena telah ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh Panwas setempat dan datanya ada di BAWASLU. Menurut undang-undang penyelesaian perkara tersebut diatas telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur penyelesaian yang ditetapkan.

Untuk itu, Panwas Kabupaten Pesisir Barat merekomendasikan agar kasus ini ditutup. Dari fakta yang telah diuraikan nampak jelas bahwa apa yang dilakukan oleh Panwaslu Pesisir Barat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan penanganan perkara tindak pidana pemilu.

Agama Islam diturunkan oleh Allah Swt melalui Nabi Muhammad Saw, tidak hanya sebagai suatu sistem kepercayaan dan peribadatan, akan tetapi juga sebagai suatu pedoman hidup umat manusia yang sumber-sumbernya terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang mencakup aspek- aspek aqidah, ibadah, akhlak, tata cara atau etika dalam hidup bermasyarakat, atau juga disebut *way of live* bagi pemeluknya. Dalam Islam hukum dikenal dengan kata fiqh atau syari'at Islam. Dalam Al-Qur'an terdapat sekitar 200 ayat yang mempunyai aspek hukum, yaitu, kira-kira sepertiga puluh dari Al-Qur'an, ini menunjukkan bahwa tujuan dasar Al-Qur'an pada hakikatnya adalah moral, ia ingin menunjukkan kesalahan dalam jiwa orang Mu'min, meningkatkan kesadaran dan moralitasnya agar menjadi syari'ahnya sendiri yang benar, dalam arti jalan menuju tuhan.

Demikian juga, apabila suatu hukum dalam Al-Qur'an ditetapkan, ini harus diterapkan dalam konteks keimanan dan keadilan, disisi lain norma-norma hukum pada dasarnya bersifat lokal dan temporal, sehingga tuhan lebih sering menyerahkan dengan tegas kepada manusia tugas untuk mengatur seluk beluk dan kebebasan untuk meninjau kembali norma-norma hukum itu, sehingga selalu terbuka kemungkinan untuk menggantinya dengan yang lain sesuai kebutuhan setiap Negara dan masa.

Kedatangan Islam memberi dinamika baru bagi manusia dan peradaban. Selain memberikan iklim politik baru, Islam juga memberikan sistem baru yang didasarkan pada ajaran-ajarannya. Seperti tidak mendapatkan tantangan, Islam memulai kegiatan politiknya berhadapan dengan suku-suku yang sudah eksis, baru kemudian dengan

memperluas pengaruhnya. Bahkan dalam menjalankan kebijakan politiknya, Islam mengatur tata cara perang (jihad) demi untuk melindungi umatnya dan melebarkan sayap kekuasaannya.

Islam datang untuk mengembalikan kekuasaan Allah Swt yang telah dirampas manusia, menegakkan undang-undang-nya menggantikan undang-undang produk manusia. Untuk itulah Allah Swt mengirim Rasul-Rasul-nya dengan misi menegakkan agama Allah Swt serta memenangkan di atas semua sistem yang ada. Apabila kita lihat perjuangan Rasulullah SAW, dalam menegakkan agama ini, akhirnya mencapai kekuasaan politik di Madinah,. Memperoleh kekuasaan politik adalah salah satu tujuan utama sebuah partai politik, jadi dapat dipahami bahwa dakwah Rasulullah SAW, termasuk di dalamnya adalah dakwah siyasah.

Pada dasarnya agama Islam sangat sosialis tidak menekan kepada pemeluknya, akan tetapi dalam ajarannya mencantumkan batasan-batasan yang memang bertujuan demi ketentraman umat manusia itu sendiri. Secara garis besar Islam sudah mengatur dan berusaha mewujudkan kondisi Islam yang maslahah.

Sebagaimana Allah Swt. Berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang*



*demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”(Q.S. An-Nissa’: 59)*

Dalam pembentukan pemerintahan yang baik, diperlukan penetapan ajaran-ajaran Islam demi terealisasinya masyarakat yang adil, makmur serta berpegang pada syari’at Islam. Dalam hal ini perlu adanya penegasan hukum secara mendetail. Dalam Islam sendiri, *money politic* itu sangat dilarang dan perbuatannya termasuk dalam katagori *risywah*.

Dalam ajaran Islam *risywah* adalah sesuatu yang diberikan untuk membatalkan sesuatu yang haq dan membenarkan sesuatu yang batil, tapi kondisi politik yang berkembang saat ini, dipandang sebagian besar masyarakat sangat sarat dengan permainan politik uang. Suap menyuap tidak hanya dilakukan rakyat kepada pejabat negara (pegawai negeri) dan para penegak hukum, tetapi juga terjadi sebaliknya, pihak penguasa atau calon penguasa tidak jarang melakukan sedekah politik (suap) kepada tokoh-tokoh masyarakat dan rakyat agar memilihnya, mendukung keputusan politik dan kebijakan-kebijakannya, baik pada saat pemilu untuk memilih Gubernur, memilih anggota legislatif (DPR), memilih presiden, Bupati, bahkan sampai pada tingkat pemilihan kepala desa (pilkades), Suap disebut juga dengan sogok atau memberi uang pelicin, adapun dalam bahasa syariat disebut dengan *risywah*. Menurut Ali Bin Abi Thalib, *risywah* adalah suatu pemberian yang ditujukan kepada seseorang untuk membatalkan sesuatu yang hak (benar) atau membenarkan yang batil. *Risywah* adalah suatu pemberian yang tidak

dilandasi oleh keinginan untuk mendapatkan ridho Allah Swt. Sebaliknya ia merupakan perbuatan yang bertentangan dengan aturan-Nya. Secara istilah *riyswah* adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang bathil/salah atau menyalahkan yang benar, dikenal hibah atau hadiah. Di samping suap dalam syariat Islam ada juga Menurut terminologi fikih, hadiah adalah pemberian sesuatu dengan tujuan mengekspresikan kecintaan agar balik dicintai atau setidaknya bertujuan mendapat pahala, hadiah biasanya diberikan kepada keluarga, teman, tetangga, para Ulama, para Kiai atau siapapun yang dianggap baik, maka pada dasarnya hadiah adalah suatu yang wajar dan sah bahkan dianjurkan oleh syariat.

Memberi hadiah merupakan suatu hal yang baik dan terpuji, khususnya membangun semangat kebersamaan dan *Ukhuwah Islamiyah*, saling membantu dan menolong, maka pemberian hadiah itu memiliki nilai lebih karena didasarkan pada kecintaan atau sebagai ekspresi dari rasa ta'zim kepada orang yang dihormati, dibanggakan dan diteladani. Hadiah pada hakikatnya adalah pemberian kepada orang lain yang telah berjasa. Hadiah juga dapat diberikan sebagai penghargaan atas karya atau prestasi seseorang. Disamping juga ada pemberian ucapan terima kasih kepada seseorang yang telah berjasa. Sedangkan hibah adalah pemberian secara Cuma-Cuma kepada orang lain tanpa prestasi atau balasan orang lain yang diberi. Hadiah dan hibah dapat dilakukan kepada siapa saja.

Umumnya hibah diberikan oleh orang yang ada hubungan darah atau kekerabatan.

Akan tetapi hadiah di era globalisasi ini penuh muatan suap yang dikemas dengan baju *syar'i* (hadiah), baik dalam bentuk uang nominal, atau barang kongkrit, biasanya mereka menyebut “hadiah” bukan suap, yang bentuk hadiahnya bersifat fariatif, tergantung kebutuhan penerima.

Tindakan suap-menyuap dilarang karena termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Sebagaimana firman Allah Swt yang berbunyi :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا  
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: *“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.”* (Q.S.Al-Baqarah:188)

Salah satu unsur yang cukup penting dalam penegakan hukum Islam adalah unsur manusianya sendiri, yaitu aspek kesadaran hukum. Karena ketika berbicara unsur manusia dari aspek kesadaran hukum disuatu masyarakat, maka otomatis mencoba memahami dan menyoroti segi manusia dari individunya, sebagai pembentuk budaya hukum. Di sinilah harus dibicarakan soal mintal, akhlak, moral dan etika, sebab semua itulah substansi individu manusia.

Tujuan hukum Islam adalah untuk melindungi dan memelihara kemaslahatan manusia dengan benar dan sebaik-baiknya, dan kemaslahatan itu utamanya ditunjukkan untuk menjamin hak-hak dasar kemanusiaan yang meliputi :

1. Hak memelihara agama dan kebebasan beragama.
2. Hak memelihara jiwa.
3. Hak memelihara akal.
4. Hak memelihara keturunan.
5. Hak memelihara harta.

Budaya hukum masyarakat yang tinggi adalah masyarakat yang tidak cenderung melanggar hukum walaupun tidak ada aparat hukum yang melihatnya, ataupun masyarakat yang tidak memanfaatkan hukum untuk mencapai tujuan bagi kepentingan sendiri atau kelompoknya, apalagi masyarakat yang cenderung untuk menghindari atau menyalah gunakan hukum dengan sengaja untuk tujuan-tujuan tertentu, yang pada akhirnya bersifat tidak adil pada masyarakat lainnya. Sehingga tegaknya hukum di tengah masyarakat memerlukan tegaknya keadilan. Melukai rasa keadilan terhadap sebagian masyarakat dapat berakibat rusaknya tatanan dan kestabilan bagi masyarakat keseluruhan karena rasa keadilan adalah unsur fitrah sejak lahir bagi manusia.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan paparan dan analisis yang penulis uraikan diatas, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk pelanggaran yang ditemukan oleh Bawaslu dalam pemilihan kepala daerah antara lain adalah pelanggaran tindak pidana, yang termasuk dalam Perampasan C-1 Plano dan Money Politik. Pelanggaran-pelanggaran tersebut telah diselesaikan oleh Panwaslu setempat dengan putusan tidak memenuhi syarat, karenanya tidak dapat dilanjutkan ketahap pengadilan. Menurut undang-undang penyelesaian perkara tersebut diatas telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur penyelesaian yang ditetapkan.
2. Sementara menurut hukum Islam sepanjang penyelesaian perkara tersebut ditujukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, maka tidak ada keberatan dalam arti tidak bertentangan dengan prinsip dalam hukum Islam. *Money politic* dalam Pemilihan Kepala Daerah termasuk dalam kategori *risywah muharramah*, diharamkan bagi pemberi dan penerima, karena pemberi dan penerima sudah jelas-jelas telah merealisasikan kecurangan yang tidak dibenarkan oleh syara'. Sedangkan perampasan C-1 Plano termasuk dalam kategori *ghasab*, bagi pelaku perampasan tersebut jika terbukti melakukan, maka haram hukumnya.

## B. SARAN

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan beberapa yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Perlunya peran akademisi, termasuk mahasiswa sebagai calon pemimpin masa depan (*ironstok*) dan agen perubahan dalam masyarakat (*Agent Of Change*) dalam memberikan edukasi kepada masyarakat luas mengenai pemilihan kepala daerah yang bersih dan bermartabat. Sehingga dapat terwujud calon pemilih yang sadar hukum dan tidak mudah dipengaruhi oleh para mafia pemilukada. Dengan sendirinya praktik kecurangan dalam pemilukada seperti Money Politic, penggelapan suara, penggelembungan daftar pemilih dan lain sebagainya dapat diminimalisir dan bahkan dapat dihapuskan.

Penulis akhirnya menyadari bahwa penulisan skripsi ini tentu tidak luput dari kesalahan dan kekeliruan. Oleh karenanya penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun, demi kesempurnaan karya tulis ilmiah ini. Hanya kepada Allah jua-lah penulis mengharapkan taufik dan hidayahnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Farid Khaliq. 2005. *Fikih Politik Islam*. Jakarta: Amzah.
- Arikunto, Suharsimi. 1993. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- bastoni, agus. 2002. *Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum RI No 22 Th 2017*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bungin, Burhan. 2015. *Metode penelitan kualitatif*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Departemen Agama. 2009 *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: Penerbit Dipenogoro.
- Kancil. 2005. *Pemilihan, Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Narbuto, Cholid. 2013. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- PBNU, *Hasil Keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2012, Jihad NU Melawan Korupsi*, Lakpesdam PBNU, Jakarta Selatan 2016.
- Perbawaslu RI, No. 23 Tahun 2003 Organisasi Bawaslu
- Purnamasari, Diah. 2015. *Amandemen Undang-Undang Pilkada*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Goris, Gotridus Seren. 2003. *Kamus Pemilu Populer*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharti, Eni. 2015. *Undang-Undang PILKADA*. Jakarta: Redaksi Sinar Grafika.

Suharti, Eni. 2002. *Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum RI No 15 Th. 2011*. Jakarta: Sinar Grafika Eni.

Tahmid, Khairuddin. 2008. *Netralitas Lembaga Peradilan Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah*. Jurnal Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung. Fakta Press.

Tim Penyusun, Profil Lembaga Bawaslu Provinsi Lampung.

Tjenreng, MB. Zubakhrum. 2006. *Pilkada Serentak Penguatan Demokrasi Diindonesia*. Jakarta: Putra Kemang.

Wahhab Khallaf, Abdul. 2005. *Politik Hukum Islam*. Yogyakarta: Tiara Kencana.

Zoelva, Hamdan. 2013. *Jurnal Konstitusi*. Jakarta : MK.

<http://sarwono-supeno.blogspot.co.id/2012/04/pengertian-pelanggaran.html>. 25/09/2016, Jam 14:36

<http://www.suara-islam.com/read/index/11960/-Hakikat-Pilkada-dalam-Perspektif-Islam->. 02/05/2016, Jam 17:39

<http://www.suara-islam.com/read/index/11960/-Hakikat-Pilkada-dalam-Perspektif-Islam->. 02/05/2016, Jam 17:39

